

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi menjadi persoalan yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang sering muncul berkaitan dengan kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah ketika tingkat kemiskinan pada suatu wilayah semakin meningkat, utamanya pada negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi permasalahan kemiskinan. Hal ini kemudian menjadikan perhatian pemerintah untuk dapat melakukan upaya penanganan. Sebab jika kemiskinan dibiarkan semakin lama akan semakin berdampak buruk bagi negara.²

Dampak buruk kemiskinan akan mengakibatkan berbagai sektor terganggu, sektor yang dikelola pemerintah, pelaku usaha, bahkan kondisi ekonomi masyarakat umum. Pengentasan kemiskinan menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus diperhatikan perkembangan dan untuk segera diatasi. Kemiskinan suatu negara menjadikan

² Putri dkk, "Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3.2 (2020), hal. 248-261.

masalah yang kompleks dan multidisipliner, sebab upaya dalam rangka mengatasi kemiskinan masih perlu dipertimbangkan kembali.³

Orientasi penanganan kemiskinan secara umum mengarah kepada pelaku usaha, termasuk pekerjaan masyarakat dan tersedianya lapangan usaha. Masyarakat menjadi objek penting dalam penanganan kemiskinan karena berhubungan langsung dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga mengenai persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal penting yang harus diselesaikan hingga tingkat masyarakat dengan ekonomi rendah. Kompleksnya masalah kemiskinan memang menjadi persoalan yang tidak mudah diantaskan, namun ini juga menjadi bagian permasalahan ekonomi yang harus di selasaikan.⁴

Konsep atau pemahaman mengenai kemiskinan dapat didefinisikan secara sederhana yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik sandang, pangan maupun papan. Kemiskinan ditandai dengan pendapatan yang rendah dan berkurangnya pemenuhan kehidupan yang semakin membuat hidupnya berat. Kondisi kemiskinan masyarakat dapat di lihat melalui kemampuan pendapatan dalam standar pemenuhan hidup. Jika pendapatan semakin jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan maka akan mengalami kesulitan untuk mensejahterakan dirinya.⁵

³Abdul Rahman Dan Mauliadi Ramli Nurlela, "Pagandeng: Diversifikasi Okupasi Pada Masyarakat Transmigran Di Desa Katulungan Kabupaten Luwu Utara." *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 4.2 (2022), hal. 51-62.

⁴Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal.1

⁵Syamsul, Syamsul. "Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Akuntabel* 17.1 (2020), hal. 140-147.

Merujuk pada Badan Pusat statistika (BPS), kemiskinan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, Pulau Jawa tercatat dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebanyak 14,8 juta jiwa setara 53,6% dari totalnya secara nasional.⁶ Berikut ini tabel jumlah kemiskinan seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa :

Tabel 1.1
Data Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021

No	Provinsi	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	DKI Jakarta	389,69	372,26	362,30	480,00	501,00
2	Banten	699,83	668,74	654,46	647,78	852,28
3	Jawa Barat	4.168,44	3.774,41	3.388,00	3.920,00	4.201,00
4	Jawa Tengah	4.450,72	3.897,20	3.743,23	3.980,90	4.109,75
5	DI Yogyakarta	488,53	460,10	448,47	475,72	506,45
6	Jawa Timur	4.617,01	4.332,59	4.112,25	4.419,10	4.572,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, tahun 2022

Penjelasan pada tabel 1.1 menunjukkan data kemiskinaan periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Sesuai dengan data tersebut diketahui dari seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa menunjukkan data kemiskin yang meningkat dinilai dari jumlahnya. Provinsi jawa timur menempati urutan pertama sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di Pulau jawa, bahkan rata-rata 4 juta lebih penduduknya dinyatakan masuk ke dalam kategori miskin. Kemudian diikuti Provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. DKI Jakarta menjadi Provinsi paling rendah, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari jumlah penduduknya yang relatif lebih kecil dari Provinsi lainnya.⁷

⁶ Badan Pusat Statistik, diakses dalam <https://www.bps.go.id/>, pada 5 Oktober 2022

⁷ Ibid.,

Tabel 1.2
Data Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Kemiskinan
1	2017	4 617,01 jiwa	11,77%
2	2018	4 332,59 jiwa	10,85%
3	2019	4 112,25 jiwa	10,20%
4	2020	4 419,10 jiwa	11,46%
5	2021	4 572,73 jiwa	11,40%

Sumber BPS Provinsi Jawa Timun, tahun 2022

Provinsi Jawa Timur merupakan sumber utama kemiskinan di Pulau Jawa. Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 4.617,01 jiwa atau 11,77%, Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah dalam periode tersebut terjadi pada tahun 2019 yaitu 4.112,25 atau 10,20%, hal ini menurun 0,65% dari tahun 2018, dan menurun 1,57% dari tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik mencapai 1,26% yaitu 4 419,10 jiwa, di tahun 2021 juga naik 0,06% yaitu sebesar 11,40%.⁸

Sesuai Pasal 10 Permen No. 42 Tahun 2010 TKPKD memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota.⁹ Maka TKPKD Jawa Timur diharapkan mampu mendorong proses perencanaan dan

⁸ Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan dan Ketimpangan" dalam <https://Jatim.bps.go.id> diakses pada 5 Oktober 2022

⁹ Dwi Susilowati, "Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis* 19.1 (2019).

pengangguran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan serta melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Salah satu faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran di suatu wilayah. Faktor pengangguran memiliki banyak pengaruh terhadap kemiskinan suatu negara. Besarnya angka pengangguran dikatakan sebagai alat ukur menentukan keberhasilan suatu ekonomi negara.¹⁰ Permasalahan pengangguran ini merupakan akibat dari susahny mencari suatu pekerjaan, artinya jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan maka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup.¹¹

Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Biasanya masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Pada intinya bagi setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat kependidikannya, sehingga

¹⁰ Suropto dan Lalu Subayil. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Yogyakarta Priode 2010-2017" hal. 127-143

¹¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 331

mereka menolak pekerjaan - pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah, mereka menolak pekerjaan tersebut karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama halnya ketika seseorang yang mungkin bekerja secara penuh per hari, namun pendapatannya sedikit, sehingga mereka seringkali tetap miskin.¹²

Fakta menunjukkan bahwa pembangunan lapangan pekerjaan telah dilakukan namun belum mampu menekan jumlah kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan penyakit yang muncul saat masyarakat mempunyai kekurangan secara material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi, dan kekurangan kekurangan lainnya yang menggambarkan kemiskinan.¹³ Berikut ini data perkembangan pengangguran yang berada pada usia produktif termasuk pada angkatan kerja di seluruh provinsi di Jawa Timur tahun 2017-2021 :

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase Pengangguran
1	2017	4.00%
1	2018	2.87%
2	2019	3.82%
3	2020	5.84%
4	2021	5.74%

Sumber BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2022

¹² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 3*, (Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN, 1997), hal.359

¹³ Ariwuni, M., dan I. Kartika. "Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8.12 (2019), hal. 2807-3114.

Tabel di atas menunjukkan tingkat pengangguran per Agustus 2017 – 2021. Sesuai tabel di atas persentase pengangguran Provinsi Jawa Timur selama periode tersebut mengalami fluktuasi. Persentase pengangguran terendah dalam periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yaitu 2,87%, sedangkan persentase pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,74%, turun 0,1% poin dibandingkan dengan Agustus 2020, tapi jumlah itu naik 0,57% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh Covid-19 yang memang secara menyeluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan. Di Jawa Timur sendiri terdapat 3,36 juta orang (10,3% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Nilai tersebut terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 248,05 ribu orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 88,53 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 240,35 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 2,78 juta orang.¹⁴

Bukan hanya pengangguran yang menjadi faktor kemiskinan, faktor jumlah penduduk juga mempengaruhi kemiskinan. Penduduk merupakan sejumlah manusia yang menempati daerah tertentu. Meledaknya jumlah penduduk akan berdampak signifikan pada ketersediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan, dan faktor-faktor penting mendasar dalam kehidupan manusia. Ketika hal ini tidak berjalan

¹⁴ RS. Radar Surabaya: Jawa Pos. 2021.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/09/11/2021/tingkat-pengangguran-terbuka-di-jatim-tembus-128-juta-orang/> diakses pada 5 Januari 2023

dengan tepat, maka akan saling berdampak dan mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang.¹⁵

Ahli ekonomi seperti Robert Malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada suatu keadaan optimum penambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan malah akan dapat menurunkannya. Jumlah penduduk yang mengalami kenaikan akan menyebabkan permasalahan sebab, dengan jumlah penduduk tinggi maka menyebabkan tingkat penambahan jumlah tenaga kerja suatu negara harus tinggi pula. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan.¹⁶

Pendapat yang serupa dengan pernyataan tersebut, menurutnya jumlah penduduk dalam hal pembangunan ekonomi suatu daerah termasuk ke dalam permasalahan yang mendasar. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan rakyat serta upaya pengurangan angka kemiskinan. Penduduk yang berkembang terlalu pesat diyakini dapat mengakibatkan pengikisan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologi, yang kemudian

¹⁵ Eny Rochaida, Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga sejahtera di Provinsikalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi*, vol. 18 No. 1 2016, hal. 14-24

¹⁶ N Gregory Mankiw, *Makroekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 154

dapat memunculkan permasalahan sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.¹⁷

Permasalahannya perkembangan pada pertumbuhan penduduk yang terus menerus terjadi tersebut apabila sudah terlampaui tinggi, dikhawatirkan akan dapat menyebabkan banyak macam masalah dan dapat menghambat pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang melampaui batas memiliki kemungkinan besar untuk menjadi suatu penghambat dalam proses pertumbuhan perekonomian apabila tidak ditangani dengan sebaik mungkin.¹⁸

Berikut data jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

Tabel 1.4
Jumlah penduduk Jawa Timur pada Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2017	19.397.878 Jiwa	19.895.094 Jiwa	39.292.972 Jiwa
2	2018	19.502.156 Jiwa	19.998.695 Jiwa	39.500.851 Jiwa
3	2019	19.600.776 Jiwa	20.097.855 Jiwa	39.698.631 Jiwa
4	2020	20.291.592 Jiwa	20.374.104 Jiwa	40.665.696 Jiwa
5	2021	20.394.280 Jiwa	20.484.509 Jiwa	40.878.789 Jiwa

Sumber BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Pada periode tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk terendah sebanyak 39,29 jiwa pada tahun 2017 dan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 40,88 jiwa terjadi pada tahun 2021. Jumlah ini apabila dibandingkan

¹⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), hal. 292.

¹⁸ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 20.

dengan jumlah penduduk saat Sensus Penduduk 2020 (40,67 juta jiwa), maka jumlah penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan sekitar 0,21% per tahun, begitupun dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa laju pertumbuhan penduduk akan terus bertambah seiring dengan pertambahan tahun yang berlalu.¹⁹

Konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah, hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah.²⁰ Index pembangunan manusia adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (pendidikan). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat misalnya tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dampak non-fisik seperti kualitas pendidikan masyarakat.²¹

Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP) menyatakan bahwa peningkatan

¹⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diakses dalam <https://Jatim.bps.go.id/> pada 5 Oktober 2022

²⁰ Imelda, Rizqi, Mohammad Balafif, dan Susi Tri Wahyuni. "Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017, hal. 67-74.

²¹ Ibid.,hal. 67-74.

IPM dapat membantu mengurangi kemiskinan. IPM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik. Ini pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja, upah yang lebih tinggi, dan pengurangan tingkat pengangguran.²²

IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.²³

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur Tahun 2017 -2021:

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur Tahun 2017 -2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	2017	70,27%
2	2018	70,77%
3	2019	71,50%
4	2020	71,71%
5	2021	72,14%

Sumber BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2022

²² UNDP, *Human Development Report 2019, Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century*, United Nations Development Programme, 2019, hal.107-109

²³ Imelda, Rizqi, Mohammad Balafif, dan Susi Tri Wahyuni. "Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017, hal. 67-74.

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 70,27% atau tumbuh 0,76%, menguat dibanding dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 70,77% atau tumbuh 0,72%. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 71,50% atau tumbuh 1,03%. Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 71,71% atau tumbuh 1,30%. Dan pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 72,14% atau tumbuh 0,60%. Peningkatan pertumbuhan IPM dari tahun ketahun dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per-kapita per-tahun yang disesuaikan..²⁴

Sesuai dengan uraian tersebut maka terdapat tiga faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan yaitu pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia. Faktor tersebut menjadi faktor penting yang membawa pengaruh pada tingkat kemiskinan. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, diakses dalam <https://jatim.bps.go.id/> pada 6 Mei 2023

manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017-2021”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?
4. Apakah pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh signifikan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

4. Untuk menguji pengaruh signifikan pengangguran, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kemanfaatan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan tentang kemiskinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat membantu mengetahui tingkatan kemiskinan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tulungagung. Melalui pengetahuan ini masyarakat akan dapat mengetahui pula tentang tingkatan kemiskinan dapat di pengaruhi oleh tingkat pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait

dengan masalah kemiskinan sehingga dapat ditemukan sebuah solusi pengentasan kemiskinan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.

E. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Variable yang digunakan terdiri dari empat variabel, yaitu:
 - a. Tiga variable bebas meliputi: pengangguran (X1), Jumlah penduduk (X2) dan Indeks Pembangunan Manusia (X3)
 - b. Satu variable terikat: Tingkat kemiskinan (Y)
2. Batasan penelitian
 - a. Penelitian ini hanya berfokus pada 3 variabel yaitu, Pengangguran, Jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia.
 - b. Karena keterbatasan waktu, tempat dan fikiran peneliti hanya menganalisis sumber data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 - c. Jangka waktu penelitian terbatas hanya pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Berikut uraian istilah yang terdapat pada judul penelitian:

a. Pengangguran

Pengangguran adalah sebutan orang yang ingin bekerja dan telah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkannya.²⁵

b. Jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitas.²⁶ Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah Negara.²⁷

c. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan manusia adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis data agar perencanaan dan pengambilan kebijakan tepat pada sasaran, serta mengevaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia.²⁸

²⁵ Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), hal. 96.

²⁶ Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Bandung: Alfabeta Mantra, 2017), hal. 7.

²⁷ Gitiningsih dan Eko Sutrisno, *Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hal. 2.

²⁸ Darwin lie dkk, *Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hal. 5.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, papan dan sandang.²⁹

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti terkait seberapa besar pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2017-2021.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1. Bagian awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
- 2. Bagian utama** merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab sebagai berikut:

²⁹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Study Kasus daerah istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 9

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai teori yang mendukung penelitian ini yang memuat tentang variabel/sub variabel Y, variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, memuat hubungan antar variabel, menguraikan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian. Melalui teknik analisis data yang digunakan dalam Bab III berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis (pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan dan pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan)

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan dan pengaruh pengangguran, jumlah penduduk dan Indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

- 3. Bagian akhir**, terdiri dari daftar pustaka, (lampiran-lampiran), surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.